

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LANGKAT**

Dodi Irawan, Mariyani

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana,
Medan, Indonesia
Dodi@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the suitability of the application of government accounting standards in the preparation of Operational Reports at the Population and Civil Registry Office of Langkat Regency in accordance with PSAP No. 12 contained in Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards. This research is a type of quantitative research and qualitative research with descriptive analysis method (Descriptive Analysis Method). Data collection techniques using interviews and documentation. The results showed that the preparation of the Operational Report at the Department of Population and Civil Registry for the 2020 fiscal year was in accordance with PSAP No. 12 concerning Operational Reports contained in government regulation no. 71 of 2010 concerning accrual-based government accounting standards.

Keywords: *Government Accounting Standards, Operational Reports, Department of Population and Civil Registration in Langkat Regency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat telah sesuai dengan PSAP No.12 yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Dodi Irawan (1), Mariyani (2)

Vol. 01 No. 02 Oktober, Tahun 2022

standar akuntansi pemerintah Berbasis Akrual. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif (Descriptive Analisis Method).. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk tahun anggaran 2020 telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Kata kunci: *Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Operasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Langkat.*

I. Pendahuluan

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing pemerintah daerah diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih dengan adanya otonomi daerah .

Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dibidang pemerintahan, termasuk dibidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Dodi Irawan (1), Mariyani (2)

Vol. 01 No. 02 Oktober, Tahun 2022

mengembangkan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien dan akuntabel.

Laporan operasional menyajikan ihtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas yang dikelola oleh SKPD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Jika dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, kejadian atau transaksi hanya dicatat apabila kas telah diterima atau dibayarkan, maka pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengharuskan kejadian atau transaksi dicatat pada periode terjadinya. Pencatatan transaksi ini akan diihtisarkan menjadi sebuah laporan keuangan berupa laporan operasional. Penyusunan laporan operasional ini dilakukan oleh semua SKPD, tak terkecuali Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari : Asumsi Kemandirian Entitas, Kesenambungan Entitas, Keterukuran dalam Satuan Uang. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Persamaan dasar akuntansi pemerintahan adalah $Aset = Kewajiban + Ekuitas + (Pendapatan - LO - Beban)$. Komponen laporan keuangan pemerintah yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Dodi Irawan (1), Mariyani (2)

Vol. 01 No. 02 Oktober, Tahun 2022

II. Metode

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2021 – September 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Kimia Farma Tbk. Kimia Farma mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1817 yang pada saat itu bergerak dalam bidang distribusi obat dan bahan baku obat. Kantor pusat KAEF beralamat di Jln. Veteran No. 9, Jakarta 10110 dan unit produksi berlokasi di Jakarta, Bandung, Semarang, Watudakon (Mojokerto), dan Tanjung Morawa – Medan. Telp: (62-21) 384-7709 (Hunting), Fax: (62-21) 381-4441.

Pada penelitian ini penulis memilih jenis penelitian data kuantitatif, yaitu data yang peneliti kumpulkan dalam bentuk angka-angka absolut dari laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan neraca perusahaan-perusahaan sektor industri telekomunikasi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020.

III. Diskusi dan Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat telah sesuai dengan PSAP No.12 yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah Berbasis Akrual.

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Dodi Irawan (1), Mariyani (2)

Vol. 01 No. 02 Oktober, Tahun 2022

1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan PSAP

No.12

Pencatatan transaksi dibagi menjadi empat jenis, yaitu Jurnal Umum (kode JU), Jurnal Penyesuaian (JP), Jurnal Penutup LRA (kode CL) dan jurnal penutup (kode CO). Pencatatan transaksi untuk setiap akun yang di Debet dan akun yang di Kredit hanya perlu diisi dengan nomor akun, selanjutnya nama akun akan terisi secara otomatis. Nama akun yang telah terisi, secara otomatis pula, akan menghasilkan buku besar (general ledger) setiap akun, neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian serta laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

2. Pencatatan Pendapatan-LO dan Pencatatan Beban berdasarkan PSAP No.12

a. Pencatatan Pendapatan-Laporan Operasional

1) Pencatatan pendapatan pajak daerah

Pencatatan pendapatan pajak daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat menggunakan kode JU (jurnal umum). Pencatatan jurnal hanya dilakukan dengan menggunakan kode akun yang akan di “Debet” dan “Kredit”. Kas di bendahara penerimaan di Debet dan Piutang Pajak di Kredit. Pencatatan transaksi ini berarti jika kas bendahara penerimaan bertambah dicatat di Debet dan piutang pajak berkurang di Kredit.

2) Pencatatan Pendapatan Retribusi Daerah

Sebagian jurnal yang dicatat sehubungan dengan pendapatan adalah : dengan menDebet Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan disisi Kredit Piutang Pendapatan Sewa tanah dan Bangunan-LO. Pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dapat dijelaskan seperti pada rumus sebelumnya bahwa jika piutang retribusi bertambah maka akan di Debet karena akan menembaah ekuitas dan begitupun sebaliknya jika berkurang maka akan di kredit.

b. Pencatatan Beban

1) Beban Pegawai

Pencatatan beban pegawai yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langka adalah dengan menDebet akun Beban Pegawai dan mengkredit akun Kas diBendahara Pengeluaran. Pencatatan transaksi ini berarti beban bertambah dicatat di Debet sedangkan kas berkurang dicatat diKredit.

2) Akuntansi Beban Barang dan Jasa

Pencatatan atas konsumsi aset yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada akhir periode adalah dengan mendebet akun beban barang dan jasa dan mengkredit akun persediaan. Pencatatan yang dilakukan dapat dijelaskan seperti pada rumus sebelumnya bahwa beban barang/ jasa merupakan pengurang ekuitas sehingga jika bertambah akan dicatat pada sisi Debet, sedangkan

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Dodi Irawan (1), Mariyani (2)

Vol. 01 No. 02 Oktober, Tahun 2022

persediaan merupakan bagian dari aset sehingga jika berkurang akan dicatat pada sisi Kredit.

3. Pengakuan Pendapatan-LO dan Pencatatan Beban berdasarkan PSAP No.12

a. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); yang diantaranya pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- 2) Pendapatan Transfer; yang diantaranya transfer dari pemerintah pusat - dana perimbangan : termasuk dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ; diantaranya pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

b. Pengakuan Beban

Pengakuan Beban pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Dodi Irawan (1), Mariyani (2)

Vol. 01 No. 02 Oktober, Tahun 2022

menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat meliputi :

- 1) Beban Operasi adalah beban yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat diantaranya ; beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban bantuan social, beban penyisihan utang dan beban lain-lain.
- 2) Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan transfer oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, meliputi ; beban transfer bantuan keuangan ke desa.
- 3) Selain itu, pengakuan beban juga dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat apabila terjadi penurunan manfaat ekonomi atas aset tetap.

Penyusunan laporan operasional yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah sesuai dengan PSAP No. 12 yang menyatakan bahwa Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi sedangkan beban diakui pada saat terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Dodi Irawan (1), Mariyani (2)

Vol. 01 No. 02 Oktober, Tahun 2022

ekonomi atau potensi jasa (PSAP No.12, Paragraf 32). Hal yang sama dikemukakan pula oleh Erlita bahwa Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan beban harus sudah diakui apabila entitas telah memperoleh manfaat ekonomi, terjadi konsumsi penggunaan aset dan terjadi penurunan manfaat ekonomi.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk tahun anggaran 2020 telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal ini dapat dilihat dari hasil pencatatan, pengakuan, serta pelaporan pendapatan - LO dan beban - LO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

V. Bibliografi

Ardiyos. 2006. *Kamus Produksi dan Manajemen*. Jakarta : Citra Harta Prima.

Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.

Agoes, Sukrisno. 2013. *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik)*. Jakarta : Salemba Empat.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Dodi Irawan (1), Mariyani (2)

Vol. 01 No. 02 Oktober, Tahun 2022

- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang. *Laporan Operasional tahun anggaran 2015-2016*. (15 Juli 2017)
- Erlina, Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan : Aksara.
- Gibson L, dkk. 1996. *Organisasi, Perilaku, Standard an Proses*. Jakarta : Bina Aksara.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jemy.2016. Analisis Pencatan dan Pelaporan Belanja Langsung dan Beban pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung. *Jurnal Universitas*. Kota Bitung, (15 Juni 2015).
- Karim, Abdul. 2015. *Penilaian Kinerja dalam Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik pada Pemerintah Kabupaten Enrekang*. *Jurnal Ilmiah AKSI STIE AMKOP*. Makassar, (1 September 2015).
- KSAP. 2010. *Impelmentasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah*. Makalah Disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrua Pemda. Jakarta, (25 Maret).
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : ANDI.
- Meliala, Tulis. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Dua*. Jakarta : Semesta Media.
- Munjiyah. 2011. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Konawe*. *Jurnal Ilmiah Universitas Halu Oleo*. Kendari, (23 November).